

# Efisiensi, Momentum Menuju "Smart APBN"

Tri Hidayatno

Mahasiswa Program Doktor Politeknik STIA LAN Jakarta

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 mengamanatkan pemberlakuan efisiensi anggaran pada pos-pos yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi pemerintah untuk tetap memastikan APBN sebagai motor pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap menjaga defisit anggaran dalam batas aman.

Terdapat dua strategi utama yang dilakukan pemerintah, yaitu efisiensi sebagai fondasi dan *refocussing* sebagai navigasi menuju paradigma baru *smart APBN* yang lebih produktif dan berkelanjutan.

## Penajaman prioritas

Efisiensi APBN yang saat ini sering diartikan sebagai pengurangan seharusnya tidak dilihat sebagai "pengurangan" semata, tetapi juga harus dipandang sebagai *refocussing* strategis.

Esensi efisiensi adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan meminimalkan kebocoran. Sayangnya, inefisiensi masih menjadi masalah dalam berbagai pos anggaran yang selama ini berjalan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024

yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya permasalahan ketidakhematian dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,55 triliun.

Demikian juga temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2023 yang mencatat bahwa belanja daerah yang tidak efektif dan efisien mencapai Rp 141,33 triliun, khusus di lima sektor, yakni ketahanan pangan, program peningkatan daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, penurunan angka tengkes (*stunting*), dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Jika menilik surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai implementasi dari Inpres No 1/2025, telah diidentifikasi setidaknya 16 pos anggaran yang wajib dilakukan efisiensi oleh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang dinilai kurang produktif dan tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

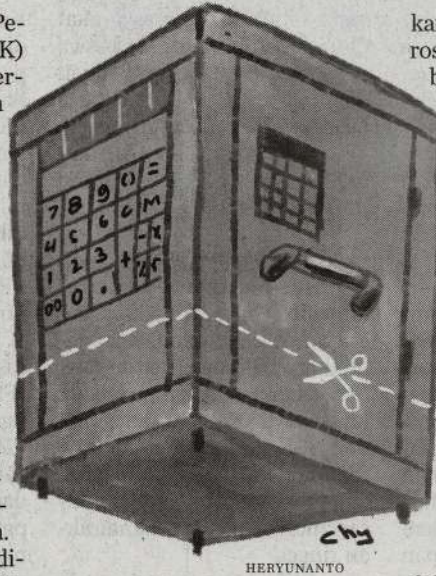
Besaran anggaran yang dipotong jumlahnya cukup besar, mencapai Rp 306,6 triliun, di mana untuk K/L Rp 256,1 triliun, sementara transfer ke daerah Rp 50,5 triliun.

Langkah berani ini juga bagian dari upaya pemerintah mengurangi "kebocoran" akibat inefisiensi. Hal ini menunjukkan komitmen dan keteguhan pemerintah bahwa APBN adalah instrumen yang digunakan untuk rakyat.

## "Refocussing" APBN

Jika program efisiensi dilaksanakan untuk memperbaiki cara belanja, *refocussing* adalah tentang mengubah arah belanja sesuai kebutuhan dan prioritas penting pemerintah. Atau mengarahkan peluru ke sasaran yang tepat.

Kini, tantangan juga bergeser. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 8 persen pada



akhir periode 2028-2029, sementara dukungan anggaran perlu dilakukan penghematan.

Di samping itu, prioritas nasional pemerintah yang terangkum dalam Astacita juga mengamanatkan delapan program prioritas yang harus dilaksanakan dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Untuk itu, diperlukan berbagai langkah inovatif dan progresif tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Hasil efisiensi yang dilakukan berdasar Inpres No 1/2025 nantinya akan dialihkan untuk membiayai program yang menjadi fokus pemerintah seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, perbaikan sektor kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Selain menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat, berbagai program ini juga akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi.

## Sinergi efisiensi dan "refocussing"

Sejatinya efisiensi dan *refocussing* bukanlah opsi, melainkan dua sisi yang saling melengkapi. Tanpa efisiensi, *refocussing* hanya akan memindah-

kan anggaran dari program boros ke program lain yang sama borosnya. Tanpa *refocussing*, efisiensi bisa terjebak dalam logika "irit anggaran" tanpa visi jangka panjang.

Jadi, kita tidak bisa atau tidak perlu memilih antara efisiensi atau *refocussing*. Yang dibutuhkan adalah "smart APBN", yaitu efisien dalam eksekusi, lincah dalam merespons perubahan, dan berani dalam memprioritaskan pada program-program yang sesuai di masa depan.

Efisiensi APBN Rp 306,6 triliun bisa menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola fiskal yang visioner dan tetap responsif. Jika dijalankan dengan prinsip efisiensi berbasis *outcome* dan *refocussing* yang progresif, akan menjadi titik balik menuju *smart APBN* yang lebih produktif, inklusif, dan antisipatif.

APBN produktif adalah APBN yang alokasi belanja modalnya difokuskan pada proyek-proyek yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) tinggi, seperti industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, APBN inklusif difokuskan pada berbagai program yang melibatkan seluruh masyarakat tanpa ada yang terlewat, seperti makan bergizi gratis, perbaikan sektor kesehatan, pembangunan SDM, proyek padat karya, dan bantuan sosial.

Adapun APBN antisipatif diperlukan untuk pembentukan dana stabilisasi fiskal guna mengantisipasi situasi tidak terduga. Untuk itu diperlukan penguatan sistem peringatan dini yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga.

Ke depan, APBN tidak lagi sekadar menjadi instrumen anggaran, tetapi juga akan menjadi alat strategis menuju Indonesia Emas 2045.